Pangripta Sembada : Jurnal Perencanaan Pembangunan
ISSN: 3090-3173

HUBUNGAN MODAL SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA WISATA PONGGOK, KABUPATEN KLATEN

Deca Melani Kristiar Putri[1], AR Rohman Taufiq Hidayat[2], Gunawan Prayitno[3]
[123]Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya
decamelani@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi percepatan pencapaian SDGs Tujuan 1 (*No Poverty*), tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Fenomena serupa terjadi di Desa Ponggok yang, meskipun dikenal berhasil mengembangkan wisata, saat ini masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan modal sosial, yang mencakup dimensi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Ponggok. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis melalui statistik deskriptif, indeks komposit, uji Chi-Square sebagai analisis pendukung, dan uji korelasi Spearman sebagai analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, modal sosial memiliki hubungan positif kuat dan signifikan dengan kesejahteraan ekonomi ($\rho = 0{,}516$; $p < 0{,}001$). Pada tingkat dimensi, jaringan sosial menunjukkan hubungan terkuat ($\rho = 0{,}529$), diikuti oleh kepercayaan ($\rho = 0{,}487$) dan norma ($\rho = 0{,}409$). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kesejahteraan ekonomi pada desa wisata tidak hanya bergantung pada pengembangan objek wisata tetapi juga pada penguatan hubungan sosial yang mampu mendorong akses dan peluang ekonomi yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Desa Wisata, Kesejahteraan Ekonomi, Modal Sosial

ABSTRACT

Developing tourism villages is one strategy for accelerating the achievement of SDG 1 (No Poverty). However, empirical evidence indicates that the economic benefits have not been distributed equitably among community members. A similar phenomenon is observed in Ponggok Village, which, despite its recognized success in tourism development, continues to face various economic challenges. This study aims to examine the relationship between social capital, encompassing the dimensions of trust, norms, and social networks, and the economic well-being of the Ponggok Village community. The study employs a quantitative approach, with data collected via questionnaires and analyzed using descriptive statistics, a composite index, the Chi-Square test as a supporting analysis, and the Spearman correlation test as the primary analysis. The results reveal a strong, significant positive relationship between social capital and economic well-being overall ($\rho = 0.516$; $p < 0.001$). At the dimensional level, social networks exhibited the strongest relationship ($\rho = 0.529$), followed by trust ($\rho = 0.487$) and norms ($\rho = 0.409$). These findings indicate that enhancing economic well-being in tourism villages depends not only on developing tourist attractions but also on strengthening social ties that foster more inclusive economic access and opportunities.

Keywords: Tourism Village, Social Capital, Economic Welfare

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi yang digalakkan untuk percepatan pencapaian SDGs Tujuan 1 (*No Poverty*), mengingat 53,9% dari total penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2024 berada di daerah perdesaan (BPS, 2024). Namun, bukti empiris dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata Taman Nasional Bwindi Impenetrable, Uganda menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan lapangan pekerjaan meningkat, penduduk lokal mengalami ketidakseimbangan manfaat karena harga lahan yang naik, persaingan kerja dengan keterampilan tinggi, serta beberapa kelompok masyarakat marginal yang memiliki akses terbatas terhadap manfaat ekonomi pariwisata (Ssebaggala, 2025). Kondisi serupa ditemukan pula di Indonesia pada pengembangan Desa Wisata Penglipuran, Bali, di mana peluang ekonomi pariwisata yang paling menguntungkan, seperti penginapan atau cenderamata, cenderung dimiliki oleh aktor dengan modal dan koneksi lebih tinggi, sementara kelompok lainnya memiliki pekerjaan berbasis upah harian atau peran marginal (Andriyani, Martono and Muhamad, 2017). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan atraksi wisata tetapi juga oleh kapasitas sosial masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai peluang ekonomi yang tersedia.

Salah satu faktor yang diyakini berperan dalam pemerataan manfaat ekonomi tersebut adalah modal sosial. Modal sosial memungkinkan masyarakat membangun kerja sama, memperkuat partisipasi, memperlancar pertukaran informasi, serta meningkatkan kemampuan kolektif dalam mengelola sumber daya lokal. Meskipun demikian, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai dimensi penyusun modal sosial sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Dimensi Modal Sosial Menurut Pendapat Para Ahli

Nama Ahli	Dimensi Modal Sosial	Deskripsi
Pierre Bourdieu (1986)	Sumber daya (*resources*), jaringan sosial, dan kepemilikan modal	Modal sosial dipandang sebagai akumulasi sumber daya aktual maupun potensial yang dimiliki individu melalui keanggotaan dalam suatu jaringan sosial yang relatif permanen. Fokus utama Bourdieu adalah bagaimana

Nama Ahli	Dimensi Modal Sosial	Deskripsi
		jaringan dimanfaatkan untuk memperoleh dan mempertahankan keuntungan sosial maupun ekonomi.
James S. Coleman (1988; 1990)	Kewajiban dan harapan (*obligations and expectations*), saluran informasi (*information channels*), serta norma dan sanksi (*norms and sanctions*)	Modal sosial dipandang sebagai karakteristik struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu maupun kelompok. Modal sosial berfungsi melalui hubungan sosial, norma, dan pertukaran informasi yang mendukung terciptanya kerja sama.
Robert D. Putnam (1993; 1995; 2000)	Kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan sosial (*social networks*)	Modal sosial merupakan karakteristik organisasi sosial yang terdiri atas kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk mencapai manfaat bersama. Ketiga dimensi tersebut saling memperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Francis Fukuyama (1995)	Kepercayaan (*trust*)	Kepercayaan dianggap sebagai inti modal sosial yang memungkinkan masyarakat membangun kerja sama secara efektif sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan pembangunan.
Michael Woolcock (1998; 2001)	*Bonding*, *bridging*, dan *linking social capital*	Woolcock mengembangkan modal sosial berdasarkan bentuk hubungan sosial, yaitu ikatan dalam kelompok (*bonding*), hubungan antarkelompok (*bridging*), dan hubungan dengan institusi atau pihak yang memiliki kewenangan (*linking*).

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap ahli memiliki fokus yang berbeda dalam menjelaskan modal sosial. Bourdieu lebih menitikberatkan jaringan sosial sebagai sumber daya; Coleman melihat fungsi struktur sosial melalui norma, kewajiban, dan saluran informasi; sedangkan Fukuyama menempatkan kepercayaan sebagai inti dari modal sosial. Woolcock kemudian mengembangkan tipologi hubungan sosial menjadi *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Berbeda dengan pandangan tersebut, Putnam memandang bahwa modal sosial merupakan kombinasi dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang saling melengkapi dalam

mendorong tindakan kolektif masyarakat. Kerangka Putnam dipilih dalam penelitian ini karena lebih sesuai dengan karakteristik pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat yang keberhasilannya ditentukan oleh tingkat kepercayaan antaraktor, kepatuhan terhadap norma bersama, serta kemampuan masyarakat membangun jaringan sosial untuk memperoleh akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Berbagai penelitian telah membuktikan pentingnya modal sosial dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jantoń-Drozdowska and Majewska (2015) menjelaskan bahwa modal sosial berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan melalui terbentuknya kepercayaan, solidaritas, serta kemudahan akses terhadap informasi dan inovasi. Dalam konteks desa wisata, Utami (2020) menemukan bahwa modal sosial yang kuat mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi baru di Desa Wisata Halal Setanggor. Penelitian Baral and Rijal (2022) di Nepal juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki jaringan sosial lebih luas dengan pelaku pariwisata memperoleh akses yang lebih besar terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi.

Meskipun hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan telah banyak dikaji, penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian dilakukan pada komunitas petani (Tanasale, Pattiselanno and Girsang, 2020; Arum, Ibrahim and Bakhtiar, 2023), masyarakat pesisir dan nelayan (Azis, Risfaisal and Rosa, 2022; F. Nugroho *et al.*, 2022; Safas, Heriyanti and Wijayanti, 2024), maupun rumah tangga perdesaan secara umum menggunakan data berskala nasional (Nasution *et al.*, 2014; Jumirah and Wahyuni, 2018; T. W. Nugroho *et al.*, 2022). Penelitian dalam konteks desa wisata masih relatif terbatas dan berfokus pada kelompok pedagang kawasan wisata (Darmawan and Barlan, 2022), kualitas hidup masyarakat desa wisata (Prayitno, Dinanti, *et al.*, 2023), atau menggunakan pendekatan kualitatif (Lestari *et al.*, 2018). Dengan demikian, belum terdapat bukti empiris yang menjelaskan hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada desa wisata yang telah memasuki fase perkembangan lanjut (*mature tourism village*), yaitu ketika manfaat ekonomi pariwisata mulai menghadapi tantangan pemerataan. Selain itu, pengukuran kesejahteraan ekonomi pada penelitian terdahulu umumnya masih terbatas pada pendapatan, pengeluaran,

atau kualitas hidup, sehingga masih belum terdapat kajian yang melihat hubungan modal sosial dengan kesejahteraan ekonomi secara multidimensi.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena karakteristik desa wisata pada fase maturitas berbeda dengan desa wisata yang sedang berkembang. Pada fase awal pengembangan, peningkatan jumlah wisatawan umumnya masih mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi sebagian besar masyarakat. Sebaliknya, ketika desa wisata telah berkembang, peningkatan jumlah pelaku usaha, persaingan antardestinasi, keterbatasan peluang ekonomi, serta perubahan tata kelola wisata berpotensi menyebabkan manfaat ekonomi tidak lagi terdistribusi secara merata. Selain itu, aspek kesejahteraan ekonomi juga penting untuk dilihat secara multidimensi karena pada desa wisata yang telah berkembang, manfaat ekonomi tidak hanya tercermin dari peningkatan pendapatan tetapi juga dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kondisi dan fasilitas tempat tinggal, menjaga kesehatan keluarga, serta memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan secara multidimensi menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana manfaat ekonomi pariwisata benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi sangat relevan pada Desa Wisata Ponggok, Kabupaten Klaten. Desa Ponggok merupakan salah satu contoh keberhasilan pengembangan desa wisata di Indonesia yang berhasil meningkatkan pendapatan asli desa dari sekitar Rp80 juta per tahun sebelum pengembangan wisata menjadi Rp14,2 miliar pada tahun 2017 (Prayudha, 2024). Namun, keberhasilan tersebut kini mulai dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain penurunan jumlah wisatawan akibat meningkatnya persaingan destinasi wisata air, menurunnya pendapatan sebagian pedagang karena perubahan sistem bagi hasil, berkurangnya kemampuan BUMDes dalam memberikan pengembalian investasi kepada masyarakat, serta banyak warga yang memilih bekerja di luar ekosistem wisata dalam desa karena sulitnya prosedur untuk bergabung dalam aktivitas wisata dalam desa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Desa Ponggok tidak lagi terletak pada bagaimana mengembangkan desa wisata, tetapi pada bagaimana menjaga agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap dapat diakses secara merata oleh

masyarakat ketika desa wisata telah memasuki fase perkembangan lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Wisata Ponggok, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran modal sosial dalam pembangunan desa wisata sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa, BUMDes, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penguatan modal sosial guna meningkatkan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

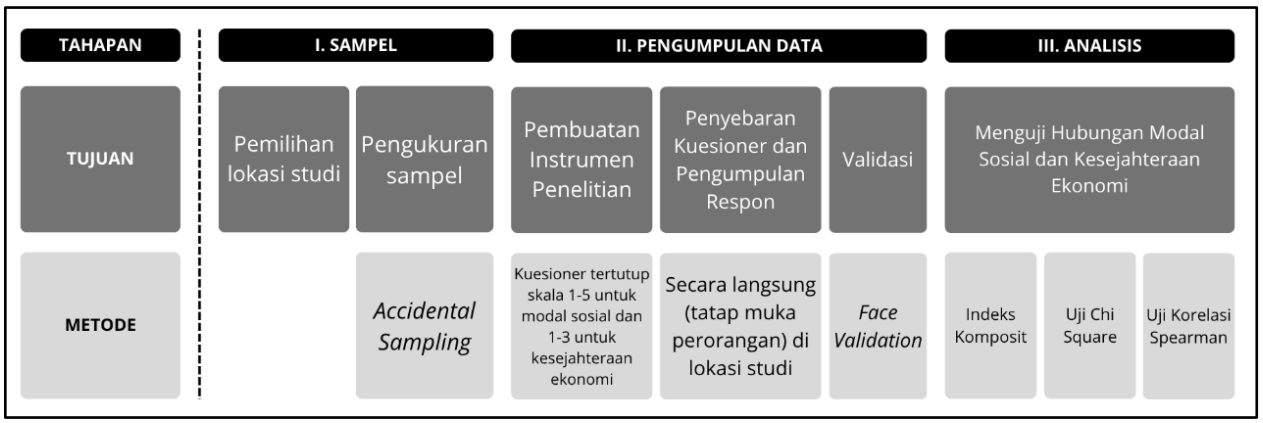
Variabel Penelitian

Oleh karena penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa wisata, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemilihan variabel-variabel ini didasarkan pada kerangka teoretis dan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya keterkaitan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi. Secara teoretis, Putnam menjelaskan bahwa modal sosial yang terukur melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memfasilitasi tindakan kolektif, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang mendukung kesejahteraan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara modal sosial dan tingkat kesejahteraan ekonomi, termasuk dalam konteks desa wisata (Utami, 2020; Adesetiani, Kolopaking and Eriyatno, 2021; Baral and Rijal, 2022; Junia, 2023; Pedro, Bagus and Adiwidjaja, 2024; Sudrajat *et al.*, 2024). Selanjutnya, setiap variabel dioperasionalisasikan ke dalam dimensi dan indikator (Tabel 2) yang menjadi dasar bagi pengembangan instrumen penelitian.

Tabel 2 Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber
Modal Sosial	Trust	Kepercayaan terhadap sesama masyarakat (K1)	(Ramadhan, Yuliati and Koeshendrajana, 2017; Sidiq, Sulistyani and Achgnes, 2021; Prayitno, Auliah, *et al.*, 2023; Suryandhani,
		Kepercayaan terhadap individu dengan latar belakang berbeda (K2)	
		Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat (K3)	
		Kepercayaan terhadap tokoh agama (K4)	
		Kepercayaan terhadap tokoh adat (K5)	
		Kepercayaan terhadap pemerintah desa (K6)	
		Kepercayaan terhadap lembaga pariwisata (BUMDes) (K7)	

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber
		Kepercayaan terhadap lembaga pariwisata (Pokdariws) (K8)	Prayitno and Surjono, 2023)
	Norms	Kesediaan untuk saling tolong menolong (N1)	
		Kepatuhan terhadap norma agama (N2)	
		Kepatuhan terhadap norma adat (N3)	
		Kepatuhan terhadap aturan pemerintah (N4)	
	Network	Kerja sama sesama masyarakat (J1)	
		Jaringan dengan pihak profesional/ ahli (J2)	
		Keterlibatan dalam organisasi/ komunitas (J3)	
		Partisipasi dalam kegiatan sosial (J4)	
		Partisipasi dalam pemberian pendapat pada pertemuan kelompok/ komunitas (J5)	
Kesejahteraan Ekonomi	Pendapatan	Total pendapatan rumah tangga/ bulan (P1)	(Mustafa, 2016; Febrianti, 2021; Roswiyanti, Ummung and Massiseng, 2022)
	Pengeluaran	Pengeluaran per kapita/ bulan (E1)	
	Kondisi Hunian	Jenis atap (K1)	
		Jenis dinding (K2)	
		Jenis lantai (K3)	
		Luas lantai (K4)	
		Status kepemilikan (K5)	
	Fasilitas Tempat Tinggal	Luas pekarangan (F1)	
		Alat elektronik (F2)	
		Pendingin ruangan (F3)	
		Sumber penerangan (F4)	
		Jenis kendaraan (F5)	
		Bahan bakar untuk memasak (F6)	
		Sumber air (F7)	
		Fasilitas MCK (F8)	
		Jarak MCK (F9)	
	Kesehatan	Kesehatan keluarga (S1)	
	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Biaya sekolah (D1)	
		Jarak sekolah (D2)	
		Proses penerimaan (D3)	
	Kemudahan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	Jarak rumah sakit terdekat (H1)	
		Jarak toko obat (H2)	
		Penanganan obat-obatan (H3)	
		Harga obat (H4)	
		Kontrasepsi (H5)	
	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Biaya transportasi (R1)	
		Fasilitas transportasi (R2)	
		Kepemilikan kendaraan (R3)	

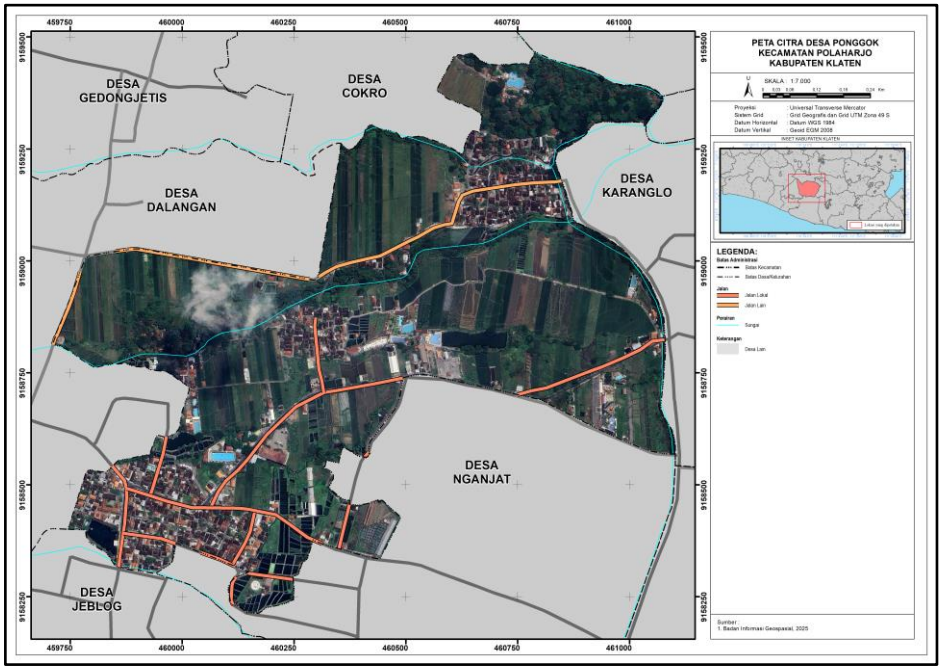


Gambar 1 Desain Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian diilustrasikan pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup tiga tahapan utama: pengambilan sampel, pengumpulan data, dan analisis. Tahap I: diawali dengan pemilihan lokasi penelitian serta penentuan responden dan pengambilan sampel secara *accidental* sampling. Studi ini menetapkan rumah tangga sebagai unit analisis, di mana "responden" merujuk pada individu yang dapat mewakili rumah tangga tersebut dan dianggap paling memahami kondisi sosial ekonomi keluarga. Pengambilan sampel di lokasi studi dilakukan menggunakan metode *non-probability sampling*, yaitu teknik *accidental sampling*. Tahap II: Pengumpulan Data, berfokus pada pengumpulan data yang diperlukan berdasarkan variabel-variabel yang diamati. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 untuk variabel modal sosial dan skala Likert 1–3 untuk variabel kesejahteraan ekonomi. Setelah instrumen disusun, dilakukan *face validation* untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan telah sesuai dengan konsep yang diukur dan mudah dipahami oleh responden. Selanjutnya, kuesioner disebarkan secara langsung (tatap muka) kepada responden di lokasi penelitian sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan yang kurang dipahami. Peneliti juga berperan sebagai pihak yang mengisi atau menuliskan jawaban responden pada lembar kuesioner. Terakhir, Tahap III: Analisis Data, bertujuan untuk mengkaji hubungan antara dimensi modal sosial (kepercayaan, norma, dan jaringan sosial) dengan kesejahteraan ekonomi. Analisis diawali dengan penyusunan indeks komposit untuk memperoleh klasifikasi tingkat modal sosial dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya dilakukan uji Chi-square untuk mengetahui hubungan antar indikator dalam masing-masing variabel, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi

Spearman sebagai analisis utama untuk menguji kekuatan dan arah hubungan antara variabel modal sosial dengan kesejahteraan ekonomi.



Gambar 2 Lokasi Penelitian

Lokasi Studi

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan menjadi salah satu isu sentral dalam agenda pembangunan, mengingat 53,9% dari total penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2024 berada di daerah perdesaan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, desa wisata diyakini mampu menciptakan sumber pendapatan baru, memperkuat solidaritas sosial, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian. Adapun penelitian ini mengambil lokasi studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten karena keberhasilannya dalam peningkatan ekonomi melalui wisata tetapi saat ini menghadapi sejumlah permasalahan.

Desa Ponggok yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagaimana terlihat pada Gambar 2. dulunya dikenal sebagai salah satu desa termiskin dengan pendapatan desa hanya sekitar Rp80 juta per tahun dan mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sebelum pada akhirnya mengalami transformasi melalui pengembangan desa wisata, terutama lewat pengelolaan destinasi Umbul Ponggok. Keberhasilan tersebut membawa peningkatan signifikan dalam pendapatan desa dan kesejahteraan warga, sehingga menjadikan Desa Ponggok sebagai percontohan desa wisata mandiri. Namun di balik capaian tersebut, desa ini masih menghadapi tantangan seperti penurunan jumlah pengunjung, pengembalian

investasi oleh BUMDes, sistem bagi hasil yang dianggap kurang adil bagi sebagian pedagang, serta ketimpangan akses ekonomi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan Desa Ponggok relevan sebagai lokasi studi untuk mengkaji hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa wisata secara lebih mendalam dan kontekstual.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, yaitu salah satu teknik *non-probability sampling* yang menentukan responden berdasarkan anggota populasi yang secara kebetulan ditemui peneliti, memenuhi kriteria penelitian, dan bersedia menjadi responden (Sugiyono, 2013). Menurut Ahmed (2024), *non-probability sampling* digunakan ketika dilakukan dalam studi skala kecil atau eksploratif, terdapat kendala logistik (keterbatasan waktu, biaya, tenaga, sulit memperoleh daftar populasi, atau akses ke responden yang terbatas), serta memperoleh responden yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dianggap lebih penting daripada keterwakilan sampel terhadap keseluruhan populasi. Hal ini sesuai dengan karakteristik lokasi penelitian, di mana terdapat keterbatasan akses terhadap responden penelitian. Kondisi tersebut terjadi karena Desa Ponggok merupakan desa wisata yang mengembangkan berbagai potensi lokal, tidak hanya pada sektor pariwisata tetapi juga pada perikanan, pertanian, serta berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri, sehingga keberagaman aktivitas ekonomi ini menyebabkan masyarakat memiliki jenis pekerjaan, lokasi kerja, dan waktu pelaksanaan aktivitas yang berbeda-beda (Hastutik, Padmaningrum and Wibowo, 2021). Dengan demikian, meskipun populasi penelitian telah diketahui, yaitu sebanyak 684 keluarga (KK), keberadaan responden tidak dapat dipastikan dan tidak semua anggota populasi dapat dijangkau selama proses survei (pengumpulan data). Oleh karena itu, responden dipilih ketika berhasil ditemui di lapangan. Namun demikian, pengambilan sampel secara aksidental tetap memiliki keterbatasan karena tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih, sehingga berpotensi bias dan membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap seluruh populasi (Sugiarto *et al.*, 2023).

Terlepas dari teknik pengambilan sampel yang digunakan, informasi mengenai ukuran populasi tetap diperlukan dan dapat digunakan dalam penentuan ukuran sampel penelitian. Hal ini dikarenakan penentuan ukuran sampel

dan pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan dua keputusan yang berbeda. Ahmed (2024) menjelaskan bahwa informasi mengenai ukuran populasi digunakan untuk mengidentifikasi besaran sampel yang diperlukan, sedangkan keputusan mengenai teknik pengambilan sampel merupakan pertimbangan metodologis yang terpisah dan disesuaikan dengan tujuan serta kondisi penelitian. Oleh karena itu, jumlah populasi masyarakat Desa Ponggok tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam menghitung kebutuhan jumlah sampel menggunakan rumus Krejcie dan Morgan (1970) dengan *margin of error* sebesar 5%, sehingga diperoleh kebutuhan sampel sebanyak 250 KK. Selanjutnya, jumlah sampel tersebut didistribusikan secara proporsional ke setiap dusun berdasarkan proporsi jumlah KK agar representasi setiap wilayah sesuai dengan besarnya populasi, sedangkan pengambilan sampel pada masing-masing dusun tetap dilakukan menggunakan teknik *accidental sampling*.

Tabel 3 Distribusi Sampel Tiap Dusun

Dusun	Jumlah KK	Distribusi Jumlah KK	Sampel
Ponggok	267	39%	98
Jeblogan	72	11%	28
Kiringan	146	21%	52
Umbulsari	198	29%	72
Desa Ponggok	**683**	**100%**	**250**

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup yang didistribusikan secara tatap muka, di mana peneliti berperan sebagai *interviewer* yang mengajukan setiap pertanyaan sesuai instrumen penelitian, sedangkan narasumber/responden berperan sebagai *interviewee* yang memberikan jawaban berdasarkan kondisi dan persepsinya. Seluruh pertanyaan diajukan secara sistematis sesuai urutan dalam kuesioner, kemudian jawaban responden dicatat langsung oleh peneliti pada lembar kuesioner. Metode ini dipilih untuk memastikan setiap pertanyaan dipahami dengan baik oleh responden, meminimalkan kesalahan pengisian, serta meningkatkan kelengkapan data yang diperoleh.

Analisis Data

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data. Kedua, analisis nilai indeks menggunakan rumus indeks komposit yang dinormalisasi ke skala 0-100 dengan klasifikasi: sangat buruk (0-20), kurang baik (20,01-40), sedang (40,01-60), baik (60,01-80), dan sangat baik (80,01-100) (Triyanti and Firdaus, 2016). Ketiga, uji chi-square dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antarindikator pembentuk

dalam masing-masing variabel, yaitu indikator pada dimensi modal sosial (kepercayaan, norma, dan jaringan sosial) serta indikator pada kesejahteraan ekonomi sebagai analisis pendukung dan gambaran awal sebelum dilanjutkan ke uji korelasi sebagai analisis utama. Keempat, uji korelasi Spearman untuk mengukur arah dan besarnya kekuatan hubungan antarvariabel menggunakan SPSS 27.0 dengan kriteria kekuatan korelasi: sangat lemah (0,00-0,25), cukup (0,26-0,50), kuat (0,51-0,75), sangat kuat (0,76-0,99), dan sempurna (1,00) (Darmawan and Barlan, 2022).

Uji korelasi Spearman dipilih sebagai analisis utama karena variabel penelitian diukur menggunakan data berskala ordinal dan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi arah serta kekuatan hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi. Uji korelasi Spearman merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel ordinal tanpa mengharuskan data berdistribusi normal (Hauke and Kossowski, 2011). Selain itu, mengingat penelitian ini menggunakan *accidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, hasil analisis korelasi diinterpretasikan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel pada responden yang menjadi sampel penelitian dan generalisasi hasil terhadap seluruh populasi dilakukan secara terbatas. Meskipun demikian, uji korelasi Spearman tetap relevan dan dapat digunakan meskipun pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan secara aksidental, sebagaimana telah diterapkan oleh Anandhyta and Kinseng (2020) yang mengkaji hubungan partisipasi dengan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan wisata pesisir dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dan *Rank Spearman* sebagai uji analisis. Penggunaan *accidental sampling* pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknik *non-probability sampling* tetap dapat digunakan dalam penelitian korelasional yang bertujuan mengidentifikasi hubungan antarvariabel sosial dan ekonomi masyarakat dalam konteks wisata.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Wilayah Studi

Desa Ponggok merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Desa ini terletak di bagian timur laut Kabupaten Klaten pada ketinggian 225 mdpl dengan topografi cenderung datar dan curah hujan 2000-2500 mm/tahun. Luas wilayah desa adalah

77,22 ha yang terbagi menjadi 4 dusun: Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Potensi sumber air alami menjadi modal utama pengembangan pariwisata desa yang mencakup Umbul Ponggok, Umbul Sigedang-Kapilaler, dan Umbul Besuki.

Karakteristik Responden

Responden dapat penelitian ini meliputi 250 KK masyarakat Desa Ponggok yang memiliki karakteristik demografi yang berbeda. Keragaman karakteristik demografi tersebut dapat dilihat dari status dalam keluarga, usia, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Informasi ini nantinya dapat membantu dalam memastikan bahwa responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 4 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Kepala Keluarga	86,40
	Bukan Kepala Keluarga	13,60
Jenis Kelamin	Laki-laki	78,00
	Perempuan	22,00
Usia	26-35 tahun	13,20
	36-45 tahun	30,80
	46-55 tahun	28,00
	56-64 tahun	20,00
	> 64 tahun	8,00
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah/belum tamat SD	0,80
	Tamat SD/sederajat	16,00
	SLTP/sederajat	18,40
	SLTA/sederajat	49,20
	Perguruan Tinggi	15,60
Pekerjaan	Tidak bekerja	0,80
	Operasional wisata	2,80
	Buruh harian lepas	15,20
	Buruh Petani/Petani	5,60
	Karyawan swasta	34,00
	Pedagang	10,00
	Wiraswasta	14,00
	Lainnya	17,60
Jumlah Anggota Keluarga	< 4 orang	34,88
	4-6 orang	47,18
	> 6 orang	17,94

Tabel 4 menunjukkan distribusi demografis responden yang cukup beragam. Dilihat dari segi status dalam keluarga, mayoritas responden adalah kepala keluarga sebanyak 86,40% dan sisanya bukan kepala keluarga yang dalam hal ini adalah 100% sebagai istri. Komposisi responden ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*, responden yang berhasil dijangkau tetap merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang relevan terhadap variabel yang diteliti. Kemudian, dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase hingga 78,00%. Dominasi responden laki-laki ini mencerminkan kondisi realitas di lapangan, dimana laki-laki pada umumnya menjadi pemeran utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat, seperti bertani, berdagang,

menjadi ketua kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian, jika dilihat dari segi usia maka mayoritas responden berada pada rentang usia 36-45 tahun, yaitu 30,8%, dan persentase minimal usia responden berada pada usia > 64 tahun. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa mayoritas responden masih berada pada usia produktif dan adanya potensi angkatan kerja yang cukup tinggi di wilayah Desa Ponggok. Adapun mayoritas pekerjaan responden adalah karyawan swasta, yaitu sebesar 34,40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan tetap.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden telah menempuh pendidikan akhir hingga jenjang SLTA/sederajat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa mayoritas masyarakat Desa Ponggok telah memenuhi kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar 12 tahun, dan hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing SDM Desa Ponggok di dunia kerja. Selain itu, persentase masyarakat yang telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi juga cukup tinggi, yaitu sebesar 15,6% yang juga dapat menjadi peluang bahwa masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dari aspek jumlah keluarga, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki jumlah anggota keluarga 4-6 orang, yaitu hingga 47,18%. Kondisi ini menggambarkan struktur keluarga inti yang umum di masyarakat setempat.

Tabel 5 Kondisi Modal Sosial

Sub Variabel	Indikator	1		2		3		4		5		Modus
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Kepercayaan	K1	1	0,40	8	3,20	34	13,60	95	38,00	112	44,80	5
	K2	9	3,60	21	8,40	78	31,20	60	24,00	82	32,80	5
	K3	1	0,40	11	4,40	44	17,60	91	36,40	103	41,20	5
	K4	5	2,00	13	5,20	45	18,00	81	32,40	106	42,40	5
	K5	10	4,00	13	5,20	49	19,60	80	32,00	98	39,20	5
	K6	0	0,00	15	6,00	75	30,00	74	29,60	86	34,40	5
	K7	18	7,20	26	10,40	71	28,40	73	29,20	62	24,80	4
	K8	2	0,80	14	5,60	66	26,40	72	28,80	96	38,40	5
Norma	N1	2	0,80	10	4,00	44	17,60	85	34,00	109	43,60	5
	N2	0	0,00	13	5,20	61	24,40	72	28,80	104	41,60	5
	N3	3	1,20	13	5,20	47	18,80	93	37,20	94	37,60	5
	N4	0	0,00	8	3,20	61	24,40	89	35,60	92	36,80	5
Jaringan sosial	J1	1	0,40	11	4,40	36	14,40	88	35,20	114	45,60	5
	J2	10	4,00	36	14,40	82	32,80	89	35,60	33	13,20	4
	J3	10	4,00	25	10,00	110	44,00	78	31,20	27	10,80	3
	J4	3	1,20	12	4,80	63	25,20	66	26,40	106	42,40	5
	J5	14	5,60	52	20,80	77	30,80	76	30,40	31	12,40	3

Kondisi Modal Sosial

A. Kepercayaan

Kepercayaan terukur dari kepercayaan terhadap sesama masyarakat, individu dengan latar belakang berbeda, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemerintah desa, lembaga BUMDes, dan Pokdarwis dengan kondisi:

1) Kepercayaan terhadap sesama masyarakat didominasi oleh 44,80% responden yang menjawab sangat setuju dan 38% setuju (Tabel 5). Hasil tabulasi silang dan uji Chi-Square menunjukkan bahwa kepercayaan antarwarga berkorelasi signifikan dengan norma kesediaan saling membantu (X^2 = 438,446; p < 0,001), kerja sama sesama masyarakat (X^2 = 446,456; p < 0,001), dan partisipasi dalam kegiatan sosial (X^2 = 389,978; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan berfungsi sebagai fondasi tindakan kolektif yang mendorong solidaritas dan kerja sama dalam pengelolaan desa wisata.

2) Kepercayaan terhadap individu berlatar belakang berbeda berada pada kategori positif dengan 32,80% sangat setuju, meskipun proporsi jawaban netral cukup besar (31,20%), mencerminkan kehati-hatian sebagian warga dalam membangun relasi baru (Tabel 5). Kepercayaan jenis ini terbukti berhubungan secara signifikan dengan kemampuan membangun jaringan dengan pihak profesional (X^2 = 122,286; p < 0,001) dan keterlibatan dalam organisasi/komunitas (X^2 = 217,478; p < 0,001), menunjukkan perannya sebagai jembatan modal sosial yang memperluas akses ke sumber daya eksternal.

3) Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat (RT/RW/ketua kelompok) berada pada kategori sangat tinggi dengan 41,20% sangat setuju (Tabel 5). Hal ini terbukti mendorong kesediaan saling membantu (X^2 = 300,511; p < 0,001) dan partisipasi sosial (X^2 = 461,847; p < 0,001), menjadikan tokoh masyarakat sebagai penggerak partisipasi warga.

4) Kepercayaan terhadap tokoh agama mencapai 42,40% sangat setuju (Tabel 5). Kepercayaan ini terbukti berhubungan dengan kepatuhan terhadap norma agama (X^2 = 405,345; p < 0,001).

5) Kepercayaan terhadap tokoh adat juga tinggi (39,20% sangat setuju) (Tabel 5). Kepercayaan ini terbukti berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan terhadap norma adat (X^2 = 385,701; p < 0,001), yang terwujud dalam keterlibatan tokoh adat di Pokdarwis sebagai penjaga nilai budaya lokal.

6) Kepercayaan terhadap pemerintah desa menunjukkan bahwa 34,40% sangat setuju dan 29,60% setuju, namun proporsi netral yang cukup besar (30%) (Tabel 5).

Hal ini mengindikasikan munculnya keraguan sebagian warga pascapengambilalihan pengelolaan Umbul Sigedang oleh BUMDes dengan kewajiban setoran ke desa Rp150 juta per tahun. Kepercayaan terhadap pemerintah desa terbukti terhubung kuat dengan kepercayaan terhadap BUMDes (X^2 = 423,582; p < 0,001) dan Pokdarwis (X^2 = 452,461; p < 0,001), serta berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan (X^2 = 207,370; p < 0,001) dan partisipasi dalam pemberian pendapat (X^2 = 86,137; p < 0,001).

7) Kepercayaan terhadap BUMDes menunjukkan 29,20% setuju namun 28,40% netral dan 7,20% sangat tidak setuju (Tabel 5). Kondisi ini mencerminkan ketidakpuasan warga yang investasinya tidak dapat dikembalikan oleh BUMDes. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat, kepercayaan terhadap BUMDes juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap pemerintah desa (X^2 = 423,582; p < 0,001) dan Pokdarwis (X^2 = 367,021; p < 0,001), serta jaringan dengan pihak profesional/ahli (X^2 = 94,485; p < 0,001)

8) Pokdarwis memperoleh kepercayaan dengan 38,80% responden yang sangat setuju (Tabel 5) mencerminkan peran aktifnya dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata.

B. Norma

Norma terukur dari kesediaan tolong menolong, kepatuhan terhadap norma agama, adat, serta aturan pemerintah dengan kondisi:

a. Kesediaan untuk saling membantu didominasi oleh 43,60% responden menjawab sangat setuju (Tabel 5). Hasil tabulasi silang dan uji Chi-Square menunjukkan bahwa kepercayaan antarwarga berkorelasi signifikan dengan kepercayaan terhadap sesama masyarakat (X^2 = 438,446; p < 0,001), kerja sama sesama masyarakat (X^2 = 655,410; p < 0,001), dan partisipasi dalam kegiatan sosial (X^2 = 345,253; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa kesediaan untuk saling membantu sebagai bagian dari dimensi norma sosial terbentuk dan dipertahankan melalui hubungan sosial yang dilandasi kepercayaan serta keterlibatan kolektif masyarakat. Signifikansi hubungan dengan kepercayaan terhadap sesama masyarakat, kerja sama sesama masyarakat, dan partisipasi dalam kegiatan sosial mengindikasikan bahwa norma saling membantu tidak hanya dipahami sebagai nilai yang diyakini, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari..

b. Tingkat kepatuhan terhadap norma agama didominasi oleh 41,60% responden yang menjawab sangat setuju (Tabel 5).

Hasil tabulasi silang dan uji Chi-Square menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap norma agama ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap tokoh agama (X^2 = 405,345; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tokoh agama berperan sebagai salah satu mekanisme sosial yang memperkuat internalisasi norma agama dalam kehidupan masyarakat.

c. Tingkat kepatuhan terhadap norma adat didominasi oleh 37,60% responden menjawab sangat setuju (Tabel 5). Hasil tabulasi silang dan uji Chi-Square menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap norma adat ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap tokoh adat (X^2 = 385,701; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tokoh adat berfungsi tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai agen sosial yang membantu menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah perkembangan desa wisata.

d. Tingkat kepatuhan terhadap aturan pemerintah didominasi oleh 36,80% responden yang menjawab sangat setuju (Tabel 5). Hasil tabulasi silang dan uji Chi-Square menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan pemerintah desa ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap pemerintah desa (X^2 = 207,370; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sebagai pelaksana program terhadap pemerintah desa.

C. Jaringan Sosial

Jaringan Sosial terukur dari kerja sama sesama masyarakat, jaringan dengan pihak profesional/ahli, keterlibatan dalam organisasi/komunitas, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta partisipasi pemberian pendapat pada pertemuan kelompok/ komunitas dengan kondisi:

1) Mayoritas responden menunjukkan tingkat kerja sama yang tinggi dengan sesama masyarakat, yaitu 45,60% sangat setuju (Tabel 5). Kondisi ini mengindikasikan bahwa interaksi kolektif dan gotong royong masih menjadi praktik yang kuat di Desa Wisata Ponggok. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa kerja sama berhubungan secara signifikan dengan kepercayaan terhadap sesama masyarakat (X^2 = 445,456; p < 0,001) serta norma kesediaan saling membantu (X^2 = 655,410; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat diperkuat oleh tingginya rasa percaya dan norma timbal balik yang

mendorong terbentuknya tindakan kolektif..

2) Mayoritas responden berada pada kategori setuju dan netral terhadap jaringan dengan pihak profesional atau ahli (Tabel 5). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan eksternal masyarakat masih berkembang dan belum sekuat jaringan internal. Uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jaringan profesional dan keterlibatan dalam organisasi atau komunitas (X^2 = 456,083; p < 0,001). Hasil ini mengindikasikan bahwa organisasi berpotensi menjadi media perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya, pengetahuan, dan dukungan dari pihak eksternal.

3) Distribusi jawaban menunjukkan bahwa 78 responden (31,20%) menyatakan setuju dan 44 responden (17,60%) menyatakan sangat setuju. Sementara itu, 97 responden (38,80%) bersikap netral, 21 responden (8,40%) menyatakan tidak setuju, dan 10 responden (4,00%) menyatakan sangat tidak setuju (Tabel 5). Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun hampir separuh responden menunjukkan keterlibatan dalam komunitas, terdapat proporsi signifikan yang bersikap netral yang mencerminkan keterlibatan pasif atau tidak konsisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap sesama anggota komunitas (X^2 = 182,740; p < 0,001), kepercayaan terhadap individu dari latar belakang yang berbeda (X^2 = 217,478; p < 0,001), serta jejaring dengan kalangan profesional atau ahli (X^2 = 456,083; p < 0,001). Temuan ini mengisyaratkan bahwa organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah partisipasi sosial tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan memperluas jejaring sosial komunitas.

4) Distribusi jawaban mengenai partisipasi dalam kegiatan sosial menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, dengan 106 individu (42,40%) yang menyatakan sangat setuju (Tabel 5). Kondisi ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap kegiatan sosial di Desa Wisata Ponggok, yang terlihat dari partisipasi warga dalam kerja bakti, acara desa, serta kegiatan keagamaan atau budaya. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa partisipasi sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap sesama anggota masyarakat (X^2 = 382,978; p < 0,001) dan norma saling membantu (X^2 = 345,253; p < 0,001). Temuan ini menegaskan bahwa tingginya partisipasi sosial didasari oleh

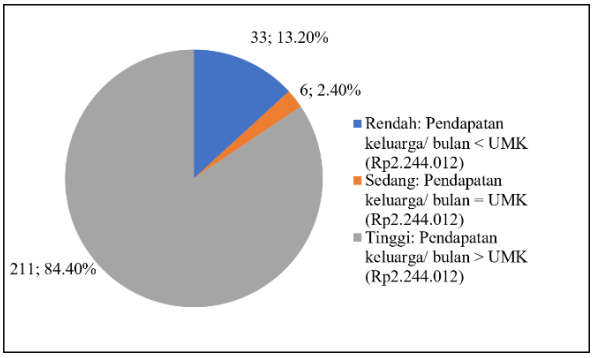
hubungan sosial yang berakar pada kepercayaan dan norma timbal balik di antara warga.

5) Distribusi jawaban menunjukkan bahwa 77 responden (30,80%) bersikap netral dan jumlah ini hampir setara dengan 76 responden (30,40%) yang menyatakan setuju yang mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa pendapat mereka akan didengar terkait pengelolaan pariwisata (Tabel 5). Hasil uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara partisipasi dalam menyampaikan pendapat dan kepercayaan terhadap pemerintah desa (X^2 = 86,137; p < 0,001). Temuan ini mengisyaratkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah desa berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi Kesejahteraan Ekonomi

A. Pendapatan

Mayoritas rumah tangga responden berada pada kategori pendapatan tinggi (84,4%), yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Ponggok relatif baik (Gambar 3). Namun, masih terdapat kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi desa wisata belum sepenuhnya merata. Analisis hubungan menunjukkan bahwa pendapatan berhubungan secara signifikan dengan pengeluaran (X^2 = 46,682; p < 0,001), kondisi tempat tinggal (X^2 = 9,780; p = 0,008), kesehatan keluarga (X^2 = 39,143; p < 0,001), kemudahan akses pendidikan (X^2 = 17,041; p < 0,001), dan kemudahan akses transportasi (X^2 = 6,602; p = 0,037). Temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

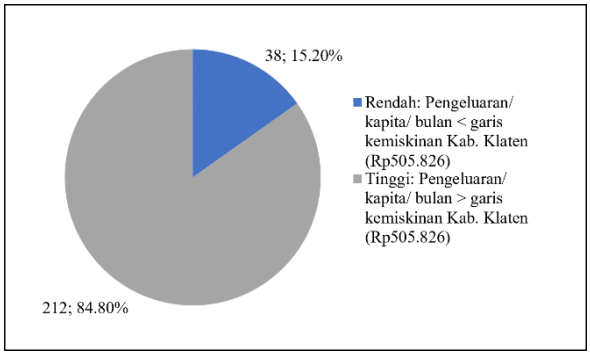


Gambar 3 Distribusi Jawaban Indikator Pendapatan

B. Pengeluaran

Sebagian besar responden memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi (84,8%) yang menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar berada pada kondisi yang relatif baik (Gambar 4). Pola ini sejalan dengan dominannya kelompok berpendapatan tinggi dan didukung oleh hasil uji Chi-Square yang menunjukkan hubungan signifikan antara pendapatan dan pengeluaran (X^2 = 46,682; p < 0,001). Dengan demikian, peningkatan kemampuan memperoleh pendapatan

cenderung diikuti oleh meningkatnya kapasitas konsumsi rumah tangga.



Gambar 4 Distribusi Jawaban Indikator Pengeluaran

C. Kondisi Hunian

Kondisi tempat tinggal responden didominasi kategori permanen (98%), yang menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah memiliki hunian yang layak dan stabil (Tabel 6). Meskipun terdapat hubungan signifikan antara kondisi tempat tinggal dan pendapatan (X^2 = 9,780; p = 0,008), dominasi rumah permanen pada seluruh kelompok pendapatan menunjukkan bahwa kualitas hunian juga merefleksikan akumulasi kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya kondisi ekonomi saat ini.

Tabel 6 Distribusi Jawaban Indikator Kondisi Hunian

Indikator	Skor	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase Jawaban (%)
Jenis Atap			
Ijuk/rumbia	1	0	0
Seng/asbes	2	5	2,00
Genteng/beton/ tile	3	245	98,00
Jenis Dinding			
Bambu/papan/daun	1	1	0,40
Setengah tembok/bata tanpa plester	2	4	1,60
Tembok	3	245	98,00
Jenis Lantai			
Tanah	1	0	0
Plester	2	9	3,60
Keramik/ubin	3	241	96,40
Luas Lantai			
≤ 50 m^2	1	15	6,00
50 < Luas/Area ≤ 100 m^2	2	167	66,80
> 100 m^2	3	68	27,20
Status Kepemilikan			
Menumpang	1	3	1,20
Sewa/kontrak	2	0	0
Milik sendiri	3	247	98,80
Kriteria			
Non Permanen (5-8)	1	0	0
Semi Permanen (9-12)	2	5	2,00
Permanen (13-15)	3	245	98,00

D. Fasilitas Tempat Tinggal

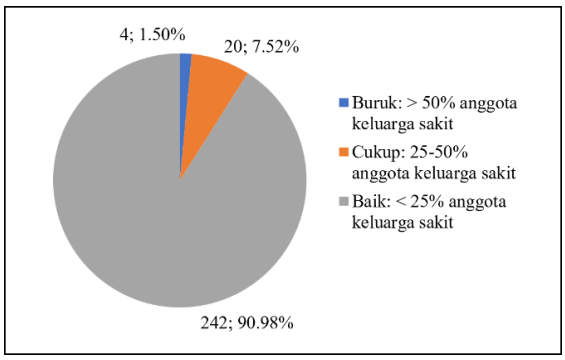
Seluruh responden berada pada kategori fasilitas tempat tinggal lengkap (100%), yang ditunjukkan melalui kepemilikan sarana dasar seperti listrik, air bersih, fasilitas MCK, alat elektronik, serta kendaraan pribadi (Tabel 7). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang relatif baik dan merata, sehingga fasilitas tempat tinggal menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang telah tercapai secara luas di wilayah penelitian.

Tabel 7 Distribusi Jawaban Indikator Fasilitas Tempat Tinggal

Indikator	Skor	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase Jawaban (%)
Luas Pekarangan			
≤ 8 m^2	1	220	88,00
8-15 m^2	2	26	10,40
> 15 m^2	3	4	1,60
Alat Elektronik			
Tidak memiliki alat elektronik	1	0	0
Memiliki 1 alat elektronik	2	0	0
Memiliki ≥ 2 alat elektronik	3	250	100,00
Pendingin Ruangan			
Alam (ventilasi alami)	1	50	20,00
Kipas angin	2	186	74,40
Air conditioner (AC)	3	14	5,60
Sumber Penerangan			
Pelita/lampu minyak	1	0	0
Petromax/lampu gas	2	0	0
Listrik (PLN)	3	250	100,00
Kendaraan			
Tidak memiliki kendaraan pribadi	1	0	0
Sepeda	2	5	2,00
Sepeda motor/mobil pribadi	3	245	98,00
Bahan Bakar Memasak			
Arang/kayu bakar	1	0	0
Minyak tanah	2	0	0
LPG/gas alam	3	250	100,00
Sumber Air			
Sungai/air hujan/mata air tak terlindung	1	0	0
Sumur gali	2	2	0,80
Leding/sumur bor/mata air terlindung	3	248	99,20
Fasilitas MCK			
Tidak punya MCK, tidak layak	1	0	0
MCK bersama/komunal	2	3	1,20
MCK milik sendiri dan layak	3	247	98,80
Jarak MCK			
> 50 meter	1	0	0
10 – 15 meter	2	0	0
< 10 meter	3	250	100,00
Kriteria			
Tidak Lengkap (9-14)	1	0	0
Cukup Lengkap (15-20)	2	0	0
Lengkap (21-27)	3	250	100,00

E. Kesehatan

Sebagian besar responden memiliki kondisi kesehatan keluarga yang baik (96,8%) yang menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti selama periode pengukuran (Gambar 5). Hasil analisis menunjukkan hubungan signifikan antara kesehatan keluarga dan pendapatan (X^2 = 39,143; p < 0,001), meskipun kesehatan yang baik juga masih ditemukan pada kelompok berpendapatan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat.



Gambar 5 Distribusi Jawaban Indikator Kesehatan

F. Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan

Mayoritas responden menilai akses pendidikan berada pada kategori mudah (91,2%) yang tercermin dari biaya yang relatif terjangkau, jarak sekolah yang dekat, serta kemudahan proses penerimaan (Tabel 8). Hasil analisis menunjukkan hubungan signifikan antara pendapatan dan kemudahan akses pendidikan (X^2 = 17,041; p < 0,001), tetapi kemudahan tersebut juga dirasakan oleh sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan dukungan kebijakan pendidikan turut berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan.

Tabel 8 Distribusi Jawaban Indikator Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan

Indikator	Skor	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase Jawaban (%)
Biaya Sekolah			
Memberatkan	1	2	0,80
Cukup	2	25	10,00
Terjangkau	3	223	89,20
Jarak ke Sekolah			
> 3 km dari tempat tinggal	1	5	2,00
1 – 3 km dari tempat tinggal	2	22	8,80
< 1 km dari tempat tinggal	3	223	89,20
Proses Penerimaan			
Mudah	1	3	1,20
Cukup	2	25	10,00
Sulit	3	222	88,80
Kriteria			
Sulit	1	0	0
Cukup	2	22	8,80
Mudahh	3	228	91,20

G. Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Kesehatan

Seluruh responden berada pada kategori cukup dalam kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan (100%) (

Tabel 9). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dasar telah tersedia dan dapat dimanfaatkan masyarakat, meskipun akses terhadap pelayanan lanjutan masih memerlukan jangkauan di luar desa. Tidak adanya variasi jawaban menunjukkan bahwa indikator ini belum menjadi hubungan antara kesehatan dengan pendapatan keluarga yang tidak berkaitan dengan kemudahan mendapatkan fasilitas

kesehatan.

Tabel 9 Distribusi Jawaban Indikator Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Kesehatan

Indikator	Skor	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase Jawaban (%)
Jarak Rumah Sakit			
> 3 km dari tempat tinggal	1	250	100,00
1 – 3 km dari tempat tinggal	2	0	0
< 1 km dari tempat tinggal	3	0	0
Jarak Toko Obat			
> 3 km dari tempat tinggal	1	0	0
1 – 3 km dari tempat tinggal	2	250	100,00
< 1 km dari tempat tinggal	3	0	0
Penanganan Obat-Obatan			
Obat tidak tersedia di fasilitas pelayanan desa	1	0	0
Obat tersedia di fasilitas pelayanan desa tapi terbatas	2	0	0
Obat tersedia lengkap di fasilitas pelayanan desa	3	250	100,00
Harga Obat-Obatan			
Harga obat > pendapatan keluarga/bulan	1	0	0
Harga obat ≈ 20-40% dari pendapatan keluarga/bulan	2	0	0
Harga obat < 10% pendapatan keluarga/bulan	3	250	100,00
Alat Kontrasepsi			
Tidak tersedia di fasilitas desa	1	0	0
Tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan desa tetapi terkadang harus membeli sendiri	2	250	100,00
Tersedia gratis atau rutin di posyandu/puskesmas	3	0	0
Kriteria			
Sulit (5-8)	1	0	0
Cukup (9-12)	2	250	100,00
Mudahh (13-15)	3	0	0

H. Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Hampir seluruh responden memiliki akses transportasi yang mudah (99,6%), ditandai oleh keterjangkauan biaya dan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi (Tabel 10). Hasil uji Chi-Square menunjukkan hubungan signifikan antara pendapatan dan akses transportasi (X^2 = 6,602; p = 0,037), namun secara substantif perbedaannya relatif kecil karena akses transportasi telah dinikmati hampir seluruh kelompok pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa transportasi bukan lagi faktor pembatas utama kesejahteraan ekonomi di lokasi penelitian.

Tabel 10 Distribusi Jawaban Indikator Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Indikator	Skor	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase Jawaban (%)
Ongkos Kendaraan			
Memberatkan	1	0	0
Cukup	2	32	12,80
Terjangkau	3	218	87,20
Fasilitas Kendaraan			
Tidak ada akses	1	0	0
Menggunakan kendaraan umum/pinjam/sewa	2	5	2,00
Memiliki kendaraan pribadi	3	245	98,00
Status Kepemilikan Kendaraan			
Tidak ada akses	1	0	0
Milik orang lain/sewa/kendaraan umum	2	5	2,00
Milik pribadi	3	245	98,00
Kriteria			
Sulit	1	0	0
Cukup	2	1	0,40
Mudahh	3	249	99,60

Indeks Modal Sosial

Indeks modal sosial diukur berdasarkan tiga dimensi pembentuknya, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Hasil analisis indeks modal sosial disajikan pada Tabel 11. Secara keseluruhan, modal sosial responden berada pada kategori baik dengan indeks rata-rata 72,33 (baik). Dimensi norma mencatat nilai tertinggi (77,08) yang mencerminkan masih kuatnya budaya gotong royong, kepatuhan terhadap norma agama, dan partisipasi dalam tradisi adat seperti Kenduri Banyu. Kepercayaan menempati posisi kedua dengan indeks rata-rata 73,79 (baik). Namun, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu kepercayaan terhadap BUMDes yang menunjukkan indikasi penurunan karena 8,80% responden sangat tidak percaya terhadap lembaga ini, yang kemungkinan diakibatkan oleh gagalnya BUMDes dalam mengembalikan investasi warga. Terakhir, dimensi jaringan sosial memiliki nilai terendah (66,14) meskipun masih dalam kategori baik. Masyarakat cukup aktif dalam kerja sama internal komunitas, namun keterhubungan dengan pihak profesional atau ahli dan keterlibatan dalam organisasi formal masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan sosial masyarakat Desa Ponggok lebih bersifat *bonding* (internal) daripada *bridging* (eksternal).

Tabel 11 Indeks Modal Sosial

Dimensi	Sangat Buruk (%)	Buruk (%)	Cukup (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	Indeks Rata-Rata
Kepercayaan	1,20	4,80	18,00	38,80	37,20	73,79
Norma	0	4,80	12,80	41,20	41,20	77,08
Jaringan Sosial	2,80	7,60	24,80	51,60	13,60	66,14
Modal Sosial	0	6,80	14,80	42,40	36,00	72,33

Tabel 12 Indeks Kesejahteraan Ekonomi

Sub Variabel/Dimensi	Sangat Buruk (%)	Buruk (%)	Cukup (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)	Indeks Rata-Rata
Pendapatan	13,20	0	2,40	0	84,40	85,60
Pengeluaran	15,20	0	0	0	84,80	84,80
Kondisi Tempat Tinggal	0	0	1,20	10,80	88,00	91,12
Fasilitas Tempat Tinggal	0	0	21,20	0	78,80	83,11
Kesehatan	8,00	0	1,60	0	90,40	91,20
Kemudahan Pelayanan Kesehatan	0	0	100	0	0	60,00
Kemudahan Pendidikan	0	1,20	32,00	0	66,80	76,13
Kemudahan Transportasi	0	0	0,40	1,60	98,00	97,20
Kesejahteraan Ekonomi (Keseluruhan)	0	0	4,00	22,00	74,00	83,65

Indeks Kesejahteraan Ekonomi

Nilai indeks kesejahteraan ekonomi dapat terlihat pada

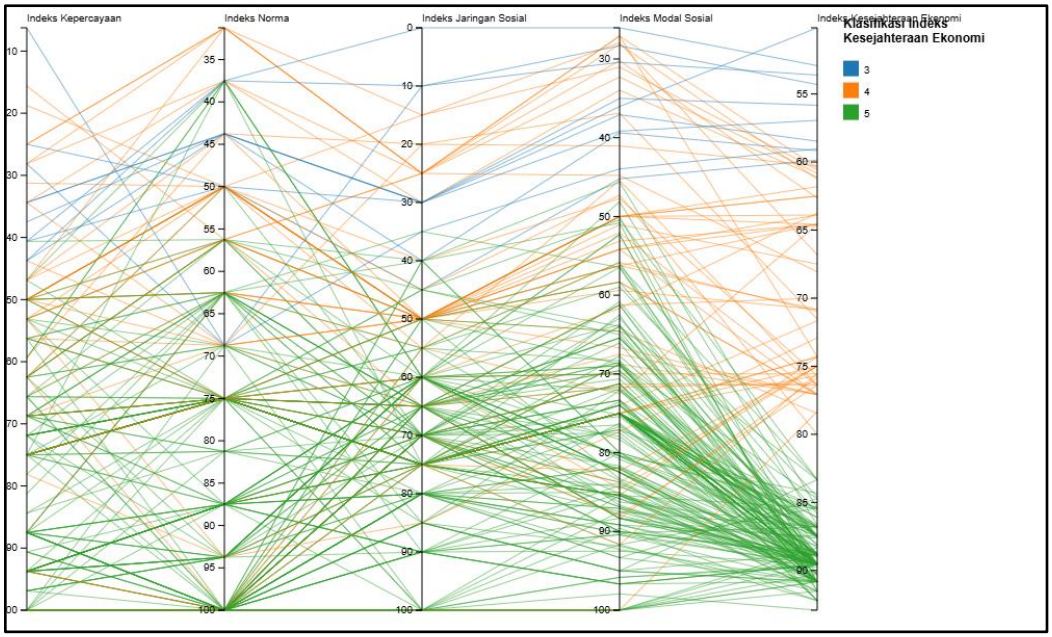
Tabel 12. Kesejahteraan ekonomi responden secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik dengan indeks rata-rata 83,65. Dimensi kondisi tempat tinggal (91,12) dan kesehatan (91,20) menunjukkan capaian tertinggi, mencerminkan kualitas hunian yang layak dan kondisi kesehatan yang relatif terjaga. Kemudahan transportasi menjadi dimensi terbaik dengan indeks 97,20 yang menunjukkan aksesibilitas mobilitas yang sangat baik.

Di sisi lain, terdapat dua dimensi dengan capaian relatif lebih rendah. Pertama, kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan hanya memperoleh indeks 60,00 dengan seluruh responden berada pada kategori cukup, yang mengindikasikan keterbatasan akses layanan kesehatan. Kedua, dimensi pendapatan menunjukkan bahwa 13,20% responden masih berada pada kategori sangat buruk, mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi desa wisata belum sepenuhnya terdistribusi secara merata antar-rumah tangga.

Hubungan Indeks Modal Sosial – Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa garis berwarna hijau yang merepresentasikan rumah tangga dengan klasifikasi sangat sejahtera cenderung terkonsentrasi pada nilai indeks modal sosial yang relatif tinggi. Sebaliknya, garis berwarna biru yang mewakili rumah

tangga dengan klasifikasi cukup sejahtera lebih banyak berada pada nilai modal sosial yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi nilai modal sosial, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat mutlak.



Gambar 6 Hubungan Indeks Modal Sosial - Kesejahteraan Ekonomi

Hasil Uji Korelasi Spearman

Tabel 13 Hasil Uji Korelasi Spearman

	Korelasi dengan Kesejahteraan Ekonomi		
	Koefisien Korelasi (ρ)	**Nilai Signifikansi (p-value)**	**Keterangan**
Kepercayaan	.487	<.001	Berkorelasi positif cukup kuat dan signifikan
Norma	.409	<.001	Berkorelasi positif cukup kuat dan signifikan
Jaringan	.529	<.001	Berkorelasi positif kuat dan signifikan
Modal Sosial	.516	<.001	Berkorelasi positif kuat dan signifikan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terlihat pada Tabel 13, diketahui bahwa:

A. Kepercayaan dengan Kesejahteraan Ekonomi

Dimensi pertama dari modal sosial, yaitu kepercayaan, memiliki koefisien korelasi 0,487 dan nilai signifikansi <0,001 yang menunjukkan bahwa dimensi ini memiliki hubungan positif cukup kuat dan signifikan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, baik terhadap sesama warga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga pengelola wisata, maka semakin baik pula kondisi kesejahteraan ekonominya. Dalam realitas di Desa Ponggok, tingginya

kepercayaan masyarakat mendorong terciptanya kerja sama dalam pengelolaan wisata, aktivitas usaha, maupun kegiatan sosial yang mendukung perkembangan ekonomi desa. Kepercayaan juga mempermudah masyarakat dalam membangun hubungan kerja, berbagi informasi, hingga menjalin kemitraan usaha, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah desa dan lembaga wisata turut mendukung partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa dan pengelolaan wisata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Norma dengan Kesejahteraan Ekonomi

Dimensi kedua dari modal sosial, yaitu norma, memiliki koefisien korelasi 0,409 dan nilai signifikansi <0,001 yang menunjukkan bahwa dimensi ini memiliki hubungan positif cukup kuat dan signifikan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat kepatuhan responden terhadap norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, maka semakin baik pula kondisi kesejahteraan ekonominya. Dalam konteks Desa Ponggok, norma sosial tercermin melalui budaya gotong royong, kesediaan saling membantu, kepatuhan terhadap norma agama, norma adat, serta aturan pemerintah desa. Norma-norma tersebut menciptakan keteraturan sosial dan solidaritas masyarakat yang mendukung keberlangsungan aktivitas wisata maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kepatuhan sosial dan partisipasi yang baik cenderung lebih mudah terlibat dalam kegiatan bersama, memperoleh dukungan sosial, serta menjaga stabilitas sosial desa wisata. Namun, dibandingkan dengan dimensi lainnya, hubungan norma dengan kesejahteraan ekonomi memiliki nilai korelasi paling rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial lebih berfungsi sebagai faktor pendukung terciptanya stabilitas dan keharmonisan sosial, sedangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih lebih banyak berkaitan dengan keterhubungan sosial dan akses terhadap peluang ekonomi.

C. Jaringan Sosial dengan Kesejahteraan Ekonomi

Terakhir, dimensi jaringan sosial memiliki koefisien korelasi 0,529 yang menunjukkan bahwa dimensi ini memiliki hubungan positif yang kuat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks Desa Ponggok sebagai desa wisata, jaringan sosial menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap peluang usaha,

informasi ekonomi, kerja sama usaha, maupun keterlibatan dalam aktivitas wisata. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial lebih luas cenderung lebih mudah memperoleh peluang kerja, relasi usaha, maupun kerja sama dengan pihak lain yang mendukung aktivitas ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, keterhubungan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai hubungan sosial biasa, tetapi juga menjadi sumber daya ekonomi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih nyata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Wisata Ponggok ($\rho = 0{,}516$; $p < 0{,}001$). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kesejahteraan ekonomi dalam konteks desa wisata tidak hanya ditentukan oleh aset ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat mengakses peluang, membangun kerja sama, dan mempertahankan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan (Putnam, 1993, 2000) yang menempatkan modal sosial sebagai sumber daya kolektif yang meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, serta sejalan dengan Fukuyama (1995) yang menjelaskan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat menurunkan hambatan koordinasi dan mendukung pencapaian ekonomi.

Pada tingkat dimensi, kepercayaan menunjukkan hubungan positif cukup kuat dengan kesejahteraan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kepercayaan antarwarga dan terhadap aktor sosial di desa berkontribusi dalam memperkuat kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata. Kondisi tersebut mendukung teori Coleman (1988) yang menyatakan bahwa kepercayaan mempermudah koordinasi melalui terbentuknya ekspektasi timbal balik dan kewajiban sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan indikasi pelemahan kepercayaan terhadap pemerintah desa dan BUMDes akibat persepsi ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan bersifat dinamis dan bergantung pada konsistensi tata kelola kelembagaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Utami (2020) yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pengelola menjadi faktor penting dalam menjaga partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Sementara itu, norma sosial memiliki tingkat kondisi paling baik, tetapi menunjukkan hubungan yang relatif lebih rendah terhadap kesejahteraan ekonomi dibanding dimensi lain. Hasil ini mengindikasikan bahwa norma berperan sebagai fondasi terciptanya kohesi sosial dan kerja sama, tetapi tidak secara langsung menghasilkan peningkatan ekonomi rumah tangga. Pola ini serupa dengan penelitian Rahmawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa dari tiga dimensi modal sosial, norma berkontribusi paling kecil dibandingkan dengan kepercayaan dan jaringan terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan Putnam (2000) yang menempatkan norma sebagai mekanisme yang memungkinkan tindakan kolektif, bukan sebagai instrumen yang secara langsung menciptakan akses ekonomi. Dalam konteks Desa Ponggok, budaya gotong royong dan kepatuhan terhadap nilai lokal masih berfungsi menjaga stabilitas sosial tetapi ketidakpuasan terhadap sistem bagi hasil menunjukkan bahwa efektivitas norma tetap dipengaruhi oleh persepsi keadilan. Kondisi ini mendukung pandangan (Portes, 1998) bahwa modal sosial juga dapat menghasilkan konsekuensi negatif ketika distribusi manfaat dipersepsikan tidak seimbang.

Berbeda dengan dua dimensi sebelumnya, jaringan sosial menjadi dimensi dengan hubungan paling kuat terhadap kesejahteraan ekonomi meskipun memiliki kondisi relatif paling rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari desa wisata sangat dipengaruhi oleh akses terhadap relasi yang membuka informasi, peluang kerja, dan keterlibatan ekonomi. Hasil tersebut mendukung teori Lin (2001) yang menjelaskan bahwa jaringan sosial menyediakan akses terhadap sumber daya yang bernilai ekonomi, serta teori Bourdieu (1986) yang memandang jaringan sebagai bentuk modal yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Baral and Rijal (2022) yang menemukan bahwa masyarakat dengan jaringan yang lebih kuat terhadap aktor pariwisata memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding kelompok dengan akses jaringan terbatas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan modal sosial pada desa wisata perlu diarahkan tidak hanya pada pemeliharaan kohesi sosial internal, tetapi juga pada perluasan akses jaringan dan penguatan kepercayaan kelembagaan agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi lebih merata. Dengan

demikian, pembangunan desa wisata yang berkelanjutan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai dasar terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial berhubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Wisata Ponggok. Di antara ketiga dimensi, jaringan sosial memiliki hubungan paling kuat terhadap kesejahteraan ekonomi, diikuti oleh kepercayaan dan norma sosial. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun hubungan sosial yang mendukung akses terhadap peluang ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Wisata Ponggok perlu dilakukan melalui penguatan tata kelola, partisipasi, dan jaringan sosial. Pemerintah desa bersama BUMDes perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi melalui pelaporan keuangan yang terbuka serta melakukan evaluasi partisipatif terhadap kebijakan yang berdampak pada pelaku usaha wisata, sekaligus menyederhanakan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata dan memperkuat layanan kesehatan desa. Pokdarwis diharapkan memperluas jejaring kemitraan dengan pihak profesional di bidang pariwisata serta mendorong keterlibatan masyarakat yang masih pasif dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, pelaku wisata dan masyarakat perlu lebih proaktif membangun kemitraan, memperluas jaringan sosial, serta memanfaatkan forum-forum partisipasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan mengembangkan peluang ekonomi. Rekomendasi tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa jaringan sosial merupakan dimensi modal sosial yang memiliki hubungan paling kuat dengan kesejahteraan ekonomi, sementara aspek kepercayaan dan partisipasi masih memerlukan penguatan melalui tata kelola yang lebih transparan dan inklusif.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk:

a. Memperluas jumlah dan cakupan responden, misalnya dengan membedakan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat keterlibatan dalam sektor wisata, jenis pekerjaan,

atau bahkan melakukan studi komparasi antar beberapa desa wisata/non wisata

b. Mengkaji pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi menggunakan pendekatan kausal atau regresi sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing dimensi modal sosial secara lebih mendalam.

c. Menggunakan teknik sampling probabilitas, seperti *simple random sampling* atau *stratified random sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan dalam sektor wisata (terlibat langsung, tidak langsung, dan tidak terlibat) agar sampel penelitian lebih representatif dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat Desa Ponggok secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adesetiani, S., Kolopaking, L. and Eriyatno (2021) "Strategi Pengembangan Usaha Wisata Homestay Berbasis Komunitas di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). Available at: https://doi.org/10.22500/9202136386.

Ahmed, S.K. (2024) "How to Choose a Sampling Technique and Determine Sample Size for Research: A Simplified Guide for Researchers," *Oral Oncology Reports*. Elsevier Ltd. Available at: https://doi.org/10.1016/j.oor.2024.100662.

Anandhyta, A.R. and Kinseng, R. (2020) "Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pesisir," *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2).

Andriyani, A.A.I., Martono, E. and Muhamad (2017) "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)," *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), pp. 1–16. Available at: http://jurnal.ugm.ac.id/JKN.

Arum, P.S., Ibrahim, J.T. and Bakhtiar, A. (2023) "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Agro Mandiri Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Agribest*, 7(2), pp. 155–161. Available at: https://doi.org/10.32528/agribest.v7i2.21123.

Azis, F., Risfaisal, R. and Rosa, I. (2022) "Social Capital of Coastal Communities (Study of Social Welfare of Seaweed Farmers in Jeneponto Regency in Indonesian)," *Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), pp. 24–36.

Baral, R. and Rijal, D.P. (2022) "Visitors Impacts on Remote Destinations: An Evaluation of a Nepalese Mountainous Village with Intense Tourism Activity," *Heliyon*, 8(8). Available at: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10395.

Bourdieu, R.P. (1986) *The Forms of Social Capital*.

BPS (2024) *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Available at: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentas

e-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html (Accessed: June 25, 2026).

Coleman, J.S. (1988) "Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology," p. 94.

Darmawan, A.S. and Barlan, Z.A. (2022) "Analisis Hubungan Modal Sosial dengan Kesejahteraan Anggota Kelompok Pedagang di Kawasan Wisata Pantai Widuri," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(5), pp. 529–542. Available at: https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i5.1066.

Febrianti, F. (2021) *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fukuyama (1995) "Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity."

Hastutik, D., Padmaningrum, D. and Wibowo, A. (2021) "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten," *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), p. 46. Available at: https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539.

Hauke, J. and Kossowski, T. (2011) "Comparison of Values of Pearson's and Spearman's Correlation Coefficients on The Same Sets of Data," *Quaestiones Geographicae*, 30(2), pp. 87–93. Available at: https://doi.org/10.2478/v10117-011-0021-1.

Jantoń-Drozdowska, E. and Majewska, M. (2015) *Social Capital as a Key Driver of Productivity Growth of The Economy: across-countries Comparison*.

Jumirah, J. and Wahyuni, H. (2018) "The Effect of Social Capital on Welfare in Indonesia," *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), pp. 65–76. Available at: http://journal.ugm.ac.id/jieb.

Junia, I.L.R. (2023) "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), pp. 828–844.

Lestari, R.P. *et al.* (2018) "Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)," *CAKRAWALA*, 12(1). Available at: https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i1.266.

Lin, N. (2001) *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815447.

Mustafa, M.S. (2016) *Studi Tingkat Kesejahteraan Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan Nila pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Mina Lestari di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur*.

Nasution, A. *et al.* (2014) "Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia," *MIMBAR*, 30(2), p. 137.

Nugroho, F. *et al.* (2022) "The Effect of Social Capital on the Welfare of Coastal Populations of Rokan Hilir Riau Indonesia," *Jurnal Sosioteknologi*, 21(2). Available at: https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2022.21.2.2.

Nugroho, T.W. *et al.* (2022) "Is There A Correlation Between Social Capital and Well-Being? A Case Study of Urban and Rural Communities in Indonesia," *HABITAT*, 33(1), pp. 55–63. Available at: https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2022.033.1.6.

Pedro, E.L., Bagus, N. and Adiwidjaja, I. (2024) "Analisis Penerapan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kota Batu," *Indonesian Social Science Review*, 2(2), pp. 78–88. Available at: https://doi.org/10.61105/issr.v2i2.90.

Portes, A. (1998) *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*, *Annu. Rev. Sociol*. Available at: www.annualreviews.org.

Prayitno, G., Auliah, A., *et al.* (2023) "Social Capital for Sustainable Tourism Development," *Cogent Social Sciences*, 10(1). Available at: https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2293310.

Prayitno, G., Dinanti, D., *et al.* (2023) "The Influence of Social Capital in Improving The Quality of Life of The Community in Sidomulyo Tourism Village, Indonesia," *Geojournal of Tourism and Geosites* , 46(1), pp. 208–217. Available at: https://doi.org/10.30892/gtg.46123-1017.

Prayudha, E.S. (2024) *Umbul Ponggok, Alirkan Rezeki Desa dari Wisata Air*. Available at: https://kolomdesa.com/umbul-ponggok-alirkan-rezeki-desa-dari-wisata-air-25431/ (Accessed: June 30, 2025).

Putnam (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. Available at: https://archive.org/details/makingdemocracyw00putn/page/n9/mode/2up (Accessed: June 29, 2026).

Putnam, R. (2000) "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community."

Rahmawati, R. *et al.* (2024) "Social Capital and Quality of Life in an Indonesian Rural Tourism Village," *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), pp. 1361–1370. Available at: https://doi.org/10.18280/ijsdp.190413.

Ramadhan, A., Yuliati, C. and Koeshendrajana, S. (2017) "Indeks Sosial Ekonomi Rumah Tanggga Nelayan Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2).

Roswiyanti, Ummung, A. and Massiseng, A.N.A. (2022) "Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan Pancing di Kelurahan Barombong, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan," *Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), pp. 39–45. Available at: https://doi.org/10.29239/j.akuatikisle.6.1.39-45.

Safas, P.H., Heriyanti, L. and Wijayanti, A. (2024) "Analisis Modal Sosial Terhadap Keberlanjutan Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan di Pondok Besi, Kota Bengkulu," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(2).

Sidiq, R.S.S., Sulistyani, A. and Achgnes, S. (2021) "Modal Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kampar," *Jurnal Education and Development*, 9(1).

Ssebaggala, J. (2025) "Tourism, Protected Areas, and The Well-being of Local Residents Near Bwindi, Uganda," *African Journal of Sustainable Tourism*, 1(1). Available at: https://doi.org/10.4102/ajst.v1i1.3.

Sudrajat, B. *et al.* (2024) "Peran Tradisi Gotong Royong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Karangpucung dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* [Preprint], (2). Available at:

https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq.

Sugiarto *et al.* (2023) *Metode Penelitian Campuran Untuk Pariwisata*. 1st ed. Penerbit ANDI. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_CAMPURAN_UNTUK_PARIWIS/tRDUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq (Accessed: July 5, 2026).

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryandhani, A.R., Prayitno, G. and Surjono (2023) "Relationship of Social Capital and Collective Action in The Development of Tourism Village," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 3(1), pp. 1–18. Available at: https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.14744.

Tanasale, P.L., Pattiselanno, A.E. and Girsang, W. (2020) "Perbandingan Kelompok Tani di Kota Ambon (Studi Kasus Kelompok Tani Gunung Nona Negeri Amahusu dan Negeri Tawiri)," *AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 8(2), pp. 149–161.

Triyanti, R. and Firdaus, M. (2016) "Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(1), pp. 29–43.

Utami, V.Y. (2020) "Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial, dan Norma," *Reformasi*, 10(1). Available at: https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index.